



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 3 September 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gedung Nusantara II lantai 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. PEMBAHASAN RKA K/L TA 2021. 2. ISU – ISU AKTUAL DAN SOLUSINYA
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 51 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 1 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas “**Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2021, Isu-isu Aktual dan Solusinya**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 sebesar Rp813.103.749.000,- (*Delapan Ratus Tiga Belas Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau naik sebesar Rp 97.672.635.000,- (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dibanding Pagu Indikatif BNPB Tahun 2021 sebesar Rp715.431.114.000,- (*Tujuh Ratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah*). Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 terdiri dari:

No	Program	Alokasi
1	Program Ketahanan Bencana	562.712.672.000
	a. Rupiah Murni (RM)	490.395.172.000
	b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	72.317.500.000
	c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-
2	Program Dukungan Manajemen	250.391.077.000
	a. Rupiah Murni (RM)	240.280.524.000
	b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	9.671.615.000
	c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	438.938.000
TOTAL		813.103.749.000

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 dengan para Pejabat Eselon I BNPB.

2. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk meningkatkan serapan anggaran BNPB Tahun 2020 karena masih rendah, yakni per tanggal 1 September 2020 sebesar Rp4.075.222.430.495,- (*Empat Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) atau baru 50,62 persen dari Pagu Anggaran BNPB Tahun 2020 sebesar Rp8.050.229.984.000,- (*Delapan Triliun Lima Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

3. Komisi VIII DPR RI mendesak BNPB untuk membahas secara rinci penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) agar lebih transparan dalam realisasinya.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memperkuat mitigasi dan pencegahan sebaran Covid-19 karena rasio antara jumlah orang yang dites dengan total jumlah test Covid-19 (*positivity rate*) di Indonesia saat ini lebih tinggi dibanding *positivity rate* di dunia.
 - b. Memastikan vaksin yang akan digunakan di Indonesia benar-benar aman dan halal, termasuk vaksin sinovac yang berasal dari China.
 - c. Meningkatkan produksi Alat Perlindungan Diri (APD) yang sesuai standard bagi para tenaga medis di puskesmas-puskesmas khususnya karena mereka berada di garda terdepan dalam melawan Covid-19.
 - d. Mewaspadaai terjadinya perubahan Covid-19 yang bermutasi menjadi lebih menular dan berbahaya.
 - e. Meyakinkan semua pihak bahwa gelaran Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 benar-benar dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.
 - f. Memperluas sosialisasi mengenai pentingnya 3M (Menggunakan Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.
 - g. Membuat evaluasi untuk menilai apakah ketahanan bencana yang dilakukan selama ini sudah efektif karena kurva sebaran Covid-19 masih terus meningkat dan belum diketahui kapan akan berakhir.
 - h. Menganggarkan alat pencegahan penyebaran Covid-19 seperti alat uji Covid-19 (*rapid test* dan *PCR/swab test*), masker, *hand sanitizer* dan disinfektan untuk lembaga-lembaga pendidikan, terutama pesantren.

- i. Menetapkan standar dan prosedur uji Covid-19 (*rapid test* atau *PCR/swab test*) agar masyarakat mendapat kejelasan mengenai tata cara dan biayanya.
- j. Mengklarifikasi dihapusnya penyebutan nama BNPB dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.57 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,



H.YANDRI SUSANTO, Spt.